

**KANTOR
BTKLPP KELAS I MANADO**

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor BTKLPP Kelas I Manado adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor BTKLPP Kelas I Manado. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manado, Januari 2024

Kepala BTKLPP Kelas 1 Manado



dr.Nolita Sesphana Takaendengan
NIP.197601082006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO
JL. TUGU ADIPURA LINGK.X KEL.PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO
TELEPON 0431-818150/818148, FAXIMILE 0431-818148

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, Januari 2024
Kepala BTKLPP Kelas 1 Manado



Atmaja Sesphana Takaendengan
NIP.197601082006042001

Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2023 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 466,171,743 atau mencapai 85 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp550.000.000.

Realisasi Belanja Negara jumlah Neto pada TA 2023 adalah sebesar Rp 15,190,426,377 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15,443,412,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 35,331,813,236 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 6,124,237,028; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 29,207,576,208; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 26,476,882 dan Rp. 35,305,336,354.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 455,364,680, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 19,309,100,280 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (18,853,735,600). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (61,354,137) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (18,915,089,737).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 38,002,855,575 dikurangi Defisit-LO sebesar (18,915,089,737) koreksi-koreksi senilai 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 16,217,570,516 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 35,305,336,354

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	550,000,000	466,171,743	84.76	359,367,010
JUMLAH PENDAPATAN		550,000,000	466,171,743	84.76	359,367,010
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6,387,176,000	6,359,220,782	99.56	6,120,208,669
Belanja Barang	B.4	9,056,236,000	8,831,205,595	97.52	7,420,303,877
Belanja Modal	B.5	0	-	#DIV/0!	5,879,880,824
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		15,443,412,000	15,190,426,377	98.36	19,420,393,370

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.10	6,124,237,028	7,238,127,276
Jumlah Aset Lancar		6,124,237,028	7,238,127,276
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5,159,455,000	5,159,455,000
Peralatan dan Mesin	C.15	41,524,077,044	40,198,171,187
Gedung dan Bangunan	C.16	15,980,451,847	15,980,451,847
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	5,500,000	5,500,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	42,213,600	42,213,600
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(33,504,121,283)	(30,601,584,517)
Jumlah Aset Tetap		29,207,576,208	30,784,207,117
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	4,500,000	4,500,000
Aset Lain-Lain	C.22	540,556,150	4,016,736,515
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(545,056,150)	(4,018,530,265)
Jumlah Aset Lainnya		-	2,706,250
JUMLAH ASET		35,331,813,236	38,025,040,643
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	26,476,882	22,185,068
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26,476,882	22,185,068
JUMLAH KEWAJIBAN		26,476,882	22,185,068
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	35,305,336,354	38,002,855,575
JUMLAH EKUITAS		35,305,336,354	38,002,855,575
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		35,331,813,236	38,025,040,643

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	455,364,680	357,296,860
JUMLAH PENDAPATAN		455,364,680	357,296,860
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,359,220,782	6,120,208,669
Beban Persediaan	D.3	1,156,055,728	2,506,002,902
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,860,303,865	4,516,357,586
Beban Pemeliharaan	D.5	786,577,167	681,808,266
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3,172,473,697	2,116,891,740
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2,974,469,041	2,955,774,774
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		19,309,100,280	18,897,043,937
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18,853,735,600)	(18,539,747,077)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar	D.11	10,631,313	1,700,100
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		175,750	370,050
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		72,161,200	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(71,985,450)	370,050
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(61,354,137)	2,070,150
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18,915,089,737)	(18,537,676,927)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18,915,089,737)	(18,537,676,927)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	38,002,855,575	35,083,437,684
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18,915,089,737)	(18,537,676,927)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLAFIKASI	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	-	(2,873,929)
JUMLAH		-	(2,873,929)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16,217,570,516	21,485,903,540
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2,697,519,221)	2,945,352,684
EKUITAS AKHIR	E.5	35,305,336,354	38,028,790,368

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor BTKLPP

Kelas I Manado

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor BTKLPP Kelas I Manado didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Permenkes Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. BTKLPP Kelas I Manado mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Kantor BTKLPP Kelas I Manado mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor BTKLPP Kelas I Manado berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui***

akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor BTKLPP Kelas I Manado. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor BTKLPP Kelas I Manado menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor BTKLPP Kelas I Manado dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor BTKLPP Kelas I Manado. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini
- diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Persediaan
Sesuai PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan dinilai dengan

menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) sesuai tanggal terjadinya transaksi masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian, transfer keluar, hibah keluar, penyerahan kepada masyarakat/pemda, penggunaan barang pemeliharaan, pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, penyerahan dari belanja bantuan sosial (bansos), barang rusak/usang, penghapusan lainnya, reklasifikasi keluar, koreksi keluar.

Untuk itu, satker agar melakukan perekaman transaksi persediaan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) setelah laporan keuangan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) *audited* selesai disusun, untuk memperoleh saldo awal persediaan yang valid. Dalam hal terdapat transaksi persediaan yang terjadi pada TAB sebelum laporan keuangan TAYL *audited* selesai disusun, satker agar menatausahakan seluruh dokumen sumber sebelum dapat merekam transaksi tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan atau Aplikasi SAKTI.

Dalam proses pencatatan transaksi persediaan pada aplikasi, pengguna (*user*) dimungkinkan melakukan kesalahan perekaman baik jumlah/kuantitas maupun nilai persediaan. Pada

aplikasi terdapat fitur transaksi koreksi untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Transaksi koreksi akan menyebabkan rumus saldo awal.

Transaksi koreksi terdiri atas Koreksi Jumlah dan Koreksi Nilai. Transaksi koreksi jumlah yang bersifat menambah kuantitas persediaan dalam neraca diperlakukan sebagaimana perolehan persediaan baru, sesuai tanggal buku perekaman transaksi.

Sedangkan transaksi koreksi jumlah yang berdampak pada pengurangan kuantitas persediaan di neraca diperlakukan sebagaimana transaksi mutasi persediaan keluar menggunakan harga satuan sesuai urutan perolehan persediaan dimaksud. Koreksi nilai hanya dapat dilakukan atas persediaan yang masih terdapat saldonya. Untuk itu, atas persediaan yang telah digunakan/dikeluarkan serta tidak terdapat saldonya perlu dilakukan koreksi melalui jurnal manual atau menggunakan fitur yang disediakan oleh aplikasi. Jurnal manual ditujukan untuk menyesuaikan pos-pos pada Laporan Operasional dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas yang tidak tepat penyajiannya akibat kesalahan terkait perekaman persediaan di masa lalu dan tidak berdampak pada saldo persediaan di neraca.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2023. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset

tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
----------------------------	---------------------

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan

dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor BTKLPP Kelas I Manado* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini

disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2023

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	550,000,000	550,000,000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	550,000,000	550,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	6,387,176,000	6,387,176,000
Belanja Barang	9,056,236,000	9,056,236,000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15,443,412,000	15,443,412,000

Realisasi

Pendapatan Rp

466.171.743

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 466,171,743 atau 85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000. Pendapatan Kantor BTKLPP Kelas I Manado terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	550,000,000	424,994,000	77.27
Pendapatan Lain-lain	-	41,177,743	#DIV/0!
Jumlah	550,000,000	466,171,743	84.76

- Realisasi Pendapatan Jasa TA 2023 mengalami kenaikan sampai 18.26 persen dibandingkan TA

2022. Hal ini disebabkan oleh kelancaran pemeriksaan Laboratorium Udara, Biologi dan Kimia Air .

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	424,994,000	359,367,010	18.26
Pendapatan Lain-lain	41,177,743	-	0.00
Jumlah	466,171,743	359,367,010	29.72

Realisasi Belanja Negara **B.2 Belanja**

Rp 15.190.426.377

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp 15,190,426,377 atau 98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 15,443,412,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,387,176,000	6,359,220,782	99.56
Belanja Barang	9,056,236,000	8,831,205,595	97.52
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	15,443,412,000	15,190,426,377	98.36
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	15,443,412,000	15,190,426,377	98.36

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 21.78% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya belanja modal pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,359,220,782	6,120,208,669	3.91
Belanja Barang	8,831,205,595	7,420,303,877	19.01
Belanja Modal	-	5,879,880,824	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	15,190,426,377	19,420,393,370	(21.78)

Belanja Pegawai

Rp6.359.220.782

B.3 Belanja Pegawai

1. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6,359,220,782 dan Rp 6,120,208,669. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.88 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain ada penambahan belanja lembur.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,927,222,448	2,987,246,093	(2.01)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS/PPPK	92,502,840	56,651,036	
Belanja Honorarium	0	0	
Belanja Lembur	125,948,000	30,981,000	306.53
Belanja Tunjangan khusus	3,213,547,706	3,046,620,640	5.48
Jumlah Belanja Kotor	6,359,220,994	6,121,498,769	3.88
Pengembalian Belanja Pegawai	212	1,290,100	(99.98)
Jumlah Belanja	6,359,220,782	6,121,498,769	3.88

Belanja Barang
Rp9.056.236.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 9.056.236.000 dan Rp 7,420,303,877. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 19.01 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan belanja barang non operasional, belanja jasa yang mengalami kenaikan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	717,169,888	2,322,655,421	(69.12)
Belanja Barang Non Operasional	1,879,561,377	717,262,937	162.05
Belanja Jasa	2,259,280,786	1,496,356,413	50.99
Belanja Pemeliharaan	734,035,267	677,631,266	8.32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,172,473,697	2,116,891,740	49.86
Belanja Barang Persediaan	68,684,580	89,506,100	(23.26)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	8,831,205,595	7,420,303,877	19.01
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	8,831,205,595	7,420,303,877	19.01

Belanja Modal Rp
Rp 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 5.879.880.824 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk TA.2023 tidak ada perencanaan modal dan tidak mengusulkan untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	5,879,880,824	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	0	5,879,880,824	-100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	5,879,880,824	-100.00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah Pada Kantor BTKLPP Kelas I Manado TA 2023 dan TA 2022.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak ada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp 5.879.880.824. Tidak ada belanja modal gedung dan bangunan tahun

2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pengembangan gedung dan bangunan	0	5,879,880,824	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	5,879,880,824	(100.00)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	5,879,880,824	(100.00)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0

*Belanja Bantuan
Sosial Rp 0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Capaian Output
Program Prioritas
Nasional*

B.7 Capaian Output Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian Kesehatan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional yaitu pada Prioritas Nasional (PN) III, IV dan VI dari 7 Prioritas

Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Untuk Ditjen P2P terdapat 2 Program Prioritas Nasional yaitu (PN) III dan (PN) VI.

Selama Periode Tahun Anggaran 2023, Output yang telah dicapai oleh BTKLPP Kelas I Manado sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 7 Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS)
- 81 Layanan Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (HS)
- 15.000 Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan (HS)
- 5 Paket Pengadaan alat dan bahan laboratorium (HS)
- 2 Paket Pemeliharaan Alat Kesehatan (HS)
- 31 Orang Pelatihan Kesehatan (HS)

Secara rinci output atas Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Kode Rincian Output	PN/Tematik	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyempurnaan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progr ess Capaian Output
1	4250.PE A.001	Prioritas Nasional	170,182,120	170,182,120	100%	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
2	4250.Q AH.003	Prioritas Nasional	3,172,059,000	3,157,811,895	99.55%	81 Layanan	81 Layanan	100%
3	4250.QJ C.001	Prioritas Nasional	296,255,000	295,462,493	99.73%	15.000 Sampel	15.209 Sampel	100%
4	4250.R AB.001	Prioritas Nasional	821,938,000	809,610,373	98.50%	5 Paket	5 Paket	100%
5	4250.R CB.001	Prioritas Nasional	524,256,000	419,795,489	80.07%	2 Paket	2 Paket	100%
6	4250.S CM.001	Prioritas Nasional	231,004,000	157,470,850	68.17%	31 Orang	31 Orang	100%

1. Program Dukungan Manajemen

- 1 Kegiatan Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program
- 5 Layanan Layanan BMN
- 1 Layanan Hubungan Masyarakat
- 1 Layanan Organisasi dan Tata Kelola
- 3 Layanan Umum
- 1 Layanan Data dan Informasi
- 12 Layanan Perkantoran
- 4 Orang mengikuti Pelatihan Manajemen SDM
- 16 Orang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- 3 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- 12 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
- 4 Dokumen Manajemen Keuangan
- 1 Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan

Secara rinci output atas Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Kode Rincian Output	PN/Tematik	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Perentase Penyelesaian	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	4815.AE.A.502	Non Prioritas Nasional	26,571,000	26,568,960	99.99 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	4815.EB.A.956	Non Prioritas Nasional	96,411,000	96,255,083	99.84 %	5 Layanan	5 Layanan	100%
3	4815.EB.A.958	Non Prioritas Nasional	46,665,000	46,603,935	99.87 %	1 Layanan	1 Layanan	100%
4	4815.EB.A.960	Non Prioritas Nasional	13,639,000	13,627,250	99.91 %	1 Layanan	1 Layanan	100%
5	4815.EB.A.962	Non Prioritas Nasional	35,715,000	35,558,252	99.56 %	3 Layanan	3 Layanan	100%
6	4815.EB.A.963	Non Prioritas Nasional	9,749,000	9,746,370	99.97 %	1 Layanan	1 Layanan	100%
7	4815.EB.A.994	Non Prioritas Nasional	9,465,238,000	9,420,738,582	99.53 %	12 Layanan	12 Layanan	100%
8	4815.EB.C.954	Non Prioritas Nasional	31,028,000	31,019,074	99.97 %	4 Orang	4 Orang	100%
9	4815.EB.C.996	Non Prioritas Nasional	95,211,000	95,202,865	99.99 %	16 Orang	16 Orang	100%
10	4815.EB.D.952	Non Prioritas Nasional	143,481,000	143,136,143	99.76 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
11	4815.EB.D.953	Non Prioritas Nasional	185,554,000	183,735,872	99.02 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
12	4815.EB.D.955	Non Prioritas Nasional	65,795,000	65,339,634	99.31 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
13	4815.EB.D.974	Non Prioritas Nasional	12,563,000	12,561,349	99.99 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan TA

*Pengeluaran
Rp0*

2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan
2022*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Bank BERSAMA No.acc 82111286163	-	-
Jumlah	-	-

Kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sudah disetor ke kas negara Tanggal 29 Desember 2023

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNB **4 Piutang PNB**

Rp0

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 DAN 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

<p><i>Bagian Lancar TPA Rp0</i></p>	<p>C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</p> <p>Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.</p>
<p><i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0</i></p>	<p>C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar</p> <p>Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.</p>
<p><i>Belanja Dibayar di Muka Rp0</i></p>	<p>C.8 Belanja Dibayar di Muka</p> <p>Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.</p>
<p><i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0</i></p>	<p>C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima</p> <p>Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.</p>

*Persediaan Rp
6,124,237,028*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.6,124,237,028 dan Rp.7,238,127,276. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	5,896,306,528	6,809,689,556
Barang untuk Pemeliharaan	-	17,912,800
Suku Cadang	214,690,500	267,232,400
Barang Persediaan Lainnya Untuk dijual Masyarakat	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ berjaga jaga	-	-
Bahan baku	-	135,924,720
Persediaan Lainnya	13,240,000	7,367,800
Jumlah	6,124,237,028	7,238,127,276

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp5.159.455.000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BTKLPP Kelas I Manado per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.159.455.000 dan Rp5.159.455.000. Tidak ada Kenaikan nilai aset tetap Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,159,455,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	5,159,455,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	6.162 m2	Jl.Tugu Adipura Lingk.X Kel.Paniki Bawah Manado	5.159.455.000
Jumlah			5.159.455.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp 41.524.077.044*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 41,524,077,044 dan Rp 40,198,171,187,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	40,198,171,187
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	1,395,131,882
Normalisasi aset	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian Aset dari penggunaan	69,226,025
Saldo per 31 Desember 2023	41,524,077,044
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(31,828,227,887)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	9,695,849,157

*Gedung dan
Bangunan
Rp 15.980.451.847*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.15.980.451.847 dan Rp.15.980.451.847 ,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15,980,451,847
Mutasi tambah:	-
Pengembangan gedung dan bangunan	
Mutasi kurang:	-
Koreksi nilai bangunan	-
Nilai Inventarisasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	15,980,451,847
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1,673,968,395)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	14,306,483,452

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp5.500.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.500.000 dan Rp5.500.000 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,500,000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	5,500,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1,925,001)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3,574,999

*Aset Tetap
Lainnya
Rp42.213.600*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp42.213.600 dan Rp42.213.600. Aset tetap tersebut berupa buku untuk perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	42,213,600
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2022	42,213,600
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	42,213,600

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp33.504.121.283*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.33,504,121,283 dan Rp.30,601,584,517. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	41,524,077,044	31,828,227,887	9,695,849,157
2	Gedung dan Bangunan	15,980,451,847	1,673,968,395	14,306,483,452
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,500,000	1,925,001	3,574,999
4	Aset Tetap Lainnya	42,213,600		42,213,600
Akumulasi Penyusutan		57,552,242,491	33,504,121,283	24,048,121,208

Aset Tak Berwujud
Rp4.500.000

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.500.000 dan Rp4.500.000. Jenis aset Pengadaan Webside kantor BTKLPP Kelas I Manado. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp540,556,150

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 540,556,150 dan Rp 4,016,736,515. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	4,016,736,515
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	69,226,025
Mutasi kurang:	
- BMN yang dihentikan	3,545,406,390
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2023	540,556,150
Akumulasi Penyusutan	540,556,150
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.545,056,150*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.545,056,150 dan dan Rp.4.018.530.265 . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	4,500,000	0	0
Aset Lain-lain	540,556,150	540,556,150	0
Jumlah	545,056,150	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN

sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 26.476.882

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 26,476,882 dan Rp22,185,068 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja yang Masih Harus Dibayar	-	Beban langganan listrik
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	Beban langganan daya dan jasa lainnya
Total	-	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023

Dibayar
Rp26.476.882

dan 2022 sebesar Rp 26,476,882 dan Rp.22,185,068, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas
Rp38.002.855.575

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 38,002,855,575 dan Rp35.083.437.684 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp455.364.680

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 455,364,680 dan Rp 357,296,860. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	424,994,000	357,296,860	19
Pendapatan Lain-lain	41,177,743	2,070,150	100
Jumlah	466,171,743	359,367,010	30

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan pengujian,

sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi dibidang kesehatan serta pendapatan layanan pendidikan dan atau pelatihan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan pelepasan aset pemerintah senilai Rp. 10,631,313 dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp.175,750 dan pendapatan denda Rp. 30,370,680.

*Beban
Pegawai
Rp6.359.220.782*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.359.220.782 dan Rp 6,120,208,669. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	2,087,308,200	2,985,955,993	(30)
Beban Gaji PPPK	68,229,500	56,651,036	
Beban Pembulatan Gaji	34,822	0	
Beban Tunjangan-tunjangan	864,152,554	0	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,213,547,706	3,046,620,640	-
Beban Lembur	125,948,000	30,981,000	307
Jumlah	6,359,220,782	6,120,208,669	4

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp1.156.055.728*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1,156,055,728 dan Rp 2,506,002,902. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1,036,576,608	576,865,812	80
Beban Persediaan lainnya	58,345,370	29,243,180	
Beban Persediaan Bahan Baku	61,133,750	1,899,893,910	(97)
Beban Persediaan - Penanganan Pandemi COVID 19			#DIV/0!
Jumlah	1,156,055,728	2,506,002,902	(54)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp4.860.303.865*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4,860,303,865 dan Rp 4,516,357,586. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	185,011,965	717,903,898	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	241,668,674	276,261,327	(12.52)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	677,000	5,265,000	(87.14)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	181,838,000	173,438,000	4.84
Beban Barang Operasional	107,974,249	865,936,616	(87.53)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	283,850,580	(100.00)
Beban Barang Non Operasional	1,586,642,973	586,045,777	170.74
Beban Langganan Listrik	387,333,630	329,215,956	17.65
Beban Langganan Telepon	0	158,697,500	(100.00)
Beban Jasa Profesi	0	213,200,849	(100.00)
Beban Jasa Lainnya	0	558,863,753	(100.00)
Beban Sewa	65,770,000	183,655,000	(64.19)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	286,583,817	9,638,000	2873.48
Beban Bahan	283,318,404	123,367,160	129.65
Beban Honor Output Kegiatan	9,600,000	7,850,000	22.29
Beban Jasa Lainnya	1,523,885,153	23,168,170	6477.49
Jumlah	4,860,303,865	4,516,357,586	7.62

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp786.577.167

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 786,577,167 dan Rp 681,808,266. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Pada tahun 2023 terjadi penurunan beban pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	583,274,768.	537,684,525.	8.48
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150,760,499.	139,946,741.	7.73
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	0.	0.	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan bangun	0.	3,300,000.	
Beban Persediaan suku cadang	52,541,900.	877,000.	5891.09
Jumlah	786,577,167	681,808,266	15.37

Beban Perjalanan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah

Dinas Rp3.172.473.697 masing-masing sebesar Rp 3,172,473,697 dan Rp 2,116,891,740. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya berkurangnya angka sehingga program-program luar kota dapat terlaksana. Rincian **Beban** Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2,578,115,697	1,960,641,740	31.49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	218,100,000	156,250,000	
Kota	29,150,000		#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	347,108,000		
Jumlah	3,172,473,697	2,116,891,740	49.86

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan Amortisasi Rp2.974.469.041

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2,974,469,041 dan Rp 2,955,774,774. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,626,472,789.	2,649,908,908.	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	345,106,668.	278,927,644.	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	183,334.	183,334.	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tdk digunakan	2,706,250.	25,629,888.	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah Penyusutan	2,974,469,041	2,954,649,774	-
Beban Amortisasi Software	-	1,125,000	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	1,125,000	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,974,469,041	2,955,774,774	-

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp61.354.137

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	10,631,313	1,700,100	
Pendapatan kegiatan non oprasional lainnya	175,750		
Beban kegiatan non operasional lainnya	(72,161,200)	370,050	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(61,354,137)	2,070,150	

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp38.002.855.575

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38,002,855,575 dan Rp35,083,437,684.

Defisit LO Rp18.915.089.737

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 18,915,089,737 dan Rp 18,537,676,927. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah

Rp0

sebesar Rp0 dan Rp Rp2.873.929 . Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi

E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas

Rp16.217.570.516

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 16,217,570,516 dan Rp. 21.485.903.540. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(466,171,743)
Ditagihkan ke Entitas Lain	15,190,426,377
Transfer Masuk	1,493,315,882
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	16,217,570,516

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp.466,171,743) sedangkan DKEL sebesar Rp 15,190,426,377

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,493,315,882 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Direktorat PL	1,395,131,882
2	Barang konsumsi	Direktorat PL	16,095,000
3	Persediaan lainnya	Direktorat SurkarKes	20,925,000
4	Barang konsumsi	Direktorat SurkarKes	22,894,000
5	Barang konsumsi	Direktorat SurkarKes	38,270,000
	Jumlah		1,493,315,882

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pada satker BTKLPP Kelas 1 Manado tidak terdapat hibah langsung

Ekuitas Akhir
Rp35.305.336.354

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 35,305,336,354 dan Rp

38,028,790,368.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- I. Terdapat Transfer masuk aset berupa incenerator beserta kelengkapannya dari Direktorat Penyehatan Lingkungan dimana proses penyerahan barang tersebut dari tahun 2021 yang menunggu penyelesaian hibah dari WHO dan baru selesai tahun 2023 senilai Rp.1.395.131.882, No BAST KN.02.07/C.VI/3243/2023 Tanggal 14 Desember 2023
- II. Terdapat Transfer Masuk persediaan dari Direktorat PL dan SKK dengan Total nilai Rp.98.184.000
- III. Terdapat persediaan usang sebesar 72.161.200 yang akan dilakukan pemusnahan di tahun 2024
- IV. Terdapat pengembalian belanja berupa uang makan bulan Desember Tahun 2022 senilai Rp.175.750